



2025



LAPORAN KEUANGAN

- UNTUK PERIODE YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2025

**PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA 05**

Jl. Perempatan Ringroad Timur Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta
Telp. (0274) 452220 Fax. (0274) 452254 | Email : dilmil211yogyakarta@gmail.com
Website : www.dilmil-yogyakarta.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Yogyakarta, 22 Juli 2025

Sekretaris

Paija
Mayor Chk

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya	40
VI. Lampiran dan Daftar	



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA
PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA**

Jl. Perempatan Ring Road Timur Ketandan Banguntapan Bantul Yogyakarta
Nomor Telepon Staff: (0274) 452220 Fax: (0274) 452254
www.dilmil-yogyakarta.go.id , dilmil211yogyakarta@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester 1 Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 22 Juli 2025
Sekretaris

Pajja
Mayor Chk

Laporan Keuangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Semester 1 Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp53.461.500 atau mencapai 36,45% dari alokasi anggaran sebesar Rp146.681.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp9.591.200; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp15.050.000 dan Rp(5.458.800).

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp59.290.300 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp(59.290.300), Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(59.290.300).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp370.000, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(59.290.300) kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp53.461.500 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp(5.828.800).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA (663293) LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SEMESTER 1 TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	-	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	146.681.000	53.461.500	36,45	44.962.000
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi		146.681.000	53.461.500	36,45	44.962.000
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	-	-	-	-
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	-	-
Belanja Modal lainnya	B.10	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi		-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		146.681.000	53.461.500	36,45	44.962.000

II. NERACA

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA (663293) NERACA PER 30 JUNI 2025 DAN TAHUN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	7.800.000	4.800.000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNB	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Perediaan	C.9	1.791.200	426.000
Jumlah Aset Lancar		9.591.200	5.226.000
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13		
Peralatan dan Mesin	C.14		
Gedung dan Bangunan	C.15		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16		
Aset Tetap Lainnya	C.17		
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19		
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20		
Aset Lain-Lain	C.21		
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22		
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		9.591.200	5.226.000
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.23	7.250.000	4.766.000
Uang Muka dari KPPN	C.24	7.800.000	4.800.000
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		15.050.000	9.566.000
JUMLAH KEWAJIBAN		15.050.000	9.566.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	(5.458.800)	(4.340.000)
JUMLAH EKUITAS		(5.458.800)	(4.340.000)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		9.591.200	5.226.000

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA (663293)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2		
Beban Persediaan	D.3	22.378.800	19.831.100
Beban Barang dan Jasa	D.4	8.961.500	7.909.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	27.950.000	25.769.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penvusutan dan Amortisasi	D.9		
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10		
Beban Lain-lain	D.11		
JUMLAH BEBAN		59.290.300	53.509.100
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(59.290.300)	(53.509.100)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persedian		-	-
Beban penyesuaian Nilai Persedian		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya		-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON		-	-
OPERASIONAL LAINNYA		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(59.290.300)	(53.509.100)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(59.290.300)	(53.509.100)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA (663293)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024
EKUITAS AWAL	E.1	370.000	4.207.100
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(59.290.300)	53.509.100
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
KOREKSI ASET TETAP	E.4	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
Jumlah Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		53.461.500	44.962.000
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(5.828.800)	(8.547.100)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta didirikan sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 dan berkendudukan di Jl. Mojopahit Ring Road Timur Banguntapan Yogyakarta. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi sebagai Pengadilan tingkat Pertama yang mempunyai Visi yaitu **“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA YANG AGUNG”** serta Misi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer II-11 Yka.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-11 Yka.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Tercapainya azas Peradilan yang sederhana , cepat dan biaya murah
2. Terciptanya pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan dan jasa pelayanan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan.
3. Terciptanya pemenuhan, perlindungan dan penegakkan hukum yang tegas dengan skala prioritas kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat.
4. Terpenuhinya infrastruktur dan supra guna penunjang pelaksanaan tugas operasional terhadap system pelayanan publik yang adil, transparan, akuntabilitas serta kopabel dalam rangka pelaksanaan penegakkan hukum yang berpihak kepada masyarakat (rakyat) pencari keadilan.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI dan Modul Aset dan Persediaan SAKTI. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Aset dan Persediaan SAKTI adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua/
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua/ Pertama kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

Realisasi
Pendapatan
Rp.0,00

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.0 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak memiliki pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	SEMESTER I TAHUN 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi Pendapatan Jasa Semester I Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan sebesar 0.00 % persen dibandingkan Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pendapatan (jasa) di Pengadilan Militer yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Selain itu, Pendapatan Lain-lain Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak mengalami kenaikan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI SEMESTER I T.A. 2025	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	0,00
Pendapatan Lain-lain	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00

Realisasi Belanja
Negara
Rp53.461.500

B.2. Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp53.461.500 atau 36.45% dari anggaran belanja sebesar Rp.146.681.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Semester I Tahun 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	146.681.000	53.461.500	36,45% 43
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	146.681.000	53.461.500	43

Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 19% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	53.461.500	44.962.000	19%
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	53.461.500	44.962.000	19%

Belanja Pegawai
Rp. 0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	-	-	-
Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	-	-	-

Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	-
Belanja Uang Makan PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Barang
Rp53.461.500

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp53.461.500 dan Rp40.966.450. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 31% dari Realisasi TA 2024.

Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	341.500	952.000	-64%
Belanja Barang Non Operasional	6.420.000	2.731.000	135%
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	19.550.000	14.950.000	31%
Belanja Jasa	100.000	0	0%
Belanja Pemeliharaan	0	0	0%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	27.050.000	25.769.000	5%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0	0	0%
Jumlah Belanja Kotor	53.461.500	40.966.450	31%
Pengembalian Belanja			
Jumlah Belanja	53.461.500	40.966.450	31%

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0.

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2024

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp.0

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.6 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Rp.0

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pada TA 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan tidak ada penambahan belanja modal Tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp.0*

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2024 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp.0*

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

**Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Semester I TA .2025 dan 2024**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp.0*

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Belanja Modal
Lainnya Rp.0*

B.10 Belanja Modal Lainnya

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp7.800.000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.800.000 dan Rp4.800.000 . Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Rek. BRI No. 651556632931000 atas nama BPG 030 DILMIL II-11 YOGYAKARTA 05	7.800.000	4.800.000
Jumlah	7.800.000	4.800.000

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp.0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	-	-
Pajak PPh yang belum disetor	-	-
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	-
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak Rp.0

C.4 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	30 Juni 2025	TH 2024
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp.0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

**Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Semester I TA 2025 dan 2024**

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar TPA
Rp.0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Pendek Rp.0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Bagian Lancar TP/TGR	-		
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0,00%	-
Bagian Lancar TPA	-		
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka Rp.0 **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	30 Juni 2023	2022
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp1.791.000

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.791.000 dan Rp426.000. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester I TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	1.791.000	426.000
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	1.791.000	426.000

Tagihan TP/TGR
Rp.0

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Semester I TA 2025 dan 2024**

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp.0

C.11 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 30 Juni 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih-Piutang Jgk
Panjang Rp.0

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah
Rp.0

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per Januari 2025	0
Mutasi tambah:	
Kenaikan nilai obyek tanah	-
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2025	0

Peralatan dan Mesin
Rp.0

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	0

Gedung dan Bangunan
Rp.0

C.15 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp.0

C.16 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

Aset Tetap Lainnya
Rp.0

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut berupa Monografi . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp.0

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp.0

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-	-

Aset Tak Berwujud
Rp.0

C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berupa Software dan Lisensi. Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo Nilai per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

C.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
-	-	-	-
Total	-	-	-

**Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp7.250.000**

C.23 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.250.000 dan Rp4.766.000. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga dan kuitansi-kuitansi UP yang belum diajukan revolving atau SPM GUP.

**Uang Muka dari
KPPN Rp.7.800.000**

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp7.800.000 dan Rp4.800.000. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

**Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp.0**

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Total	-	-

**Ekuitas
Rp(5.458.800)**

C.26 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(5.458.800) dan Rp(4.340.000). Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNBP
Rp.0

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain-LO merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya.

Beban Pegawai
Rp.0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2025 dan Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	0	0	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	-
Beban Tunj. Anak PNS	0	0	-
Beban Tunj. Struktural PNS	0	0	-
Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0	0	-
Beban Tunj. PPh TNI/POLRI	0	0	-
Beban Tunj. Beras PNS	0	0	-
Beban Uang Makan PNS	0	0	-
Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	-

Beban Persediaan
Rp22.378.800

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp22.378.800 dan Rp19.831.100. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun

tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	22.378.800	19.831.100	13%
Pemeliharaan	-	-	0%
Beban penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	0%
Beban Persediaan Lainnya	-	-	0%
Jumlah Beban Persediaan	22.378.800	19.831.100	13%

**Beban Barang
dan Jasa
Rp8.961.500**

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.961.500 dan Rp7.909.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	0	0	0%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	341.500	3.618.000	-91%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	0%
Beban Jasa Profesi	100000	560.000	-82%
Beban Bahan	8.520.000	3.731.000	128%
Jumlah	8.961.500	7.909.000	13%

**Beban
Pemeliharaan
Rp.0**

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan suku cadang	-	-	-

Jumlah	-	-	-
--------	---	---	---

Beban Perjalanan Dinas
Rp27.950.000

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp27.950.000 dan Rp25.769.000. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	26.000.000	25.769.000	1%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.950.000	0	0%
Jumlah	27.950.000	25.769.000	8%

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp.0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2025 dan tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2023	2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Jumlah	0	-	-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	-	-	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Amortisasi Lisensi	-	-	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	-
Jumah Penyusutan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	-	-	-

**Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.0**

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2025 dan tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	-	-	-
Jumlah	-	-	-

**Beban Lain-lain
Rp.0**

D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk 30 Juni 2025 dan tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk 30 Juni 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Lain-lain 30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	NAIK (TURUN)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus /Defisit
dari Kegiatan Non
Operasional
Rp.0

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2025 dan tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pos Luar Biasa
Rp.0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 30 Juni 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa 30 Juni 2025 dan 2024

URAIAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas	0	-	-
Beban Persediaan	0	-	-
Jumlah	0	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

***Ekuitas Awal
Rp.370.000***

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.370.000 dan Rp.4.207.100.

***Defisit LO
Rp.(59.290.300)***

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.(59.290.300) dan Rp.(53.509.100). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

***Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0***

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

***Koreksi Aset Tetap
Rp.0***

E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

***Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp.0***

E.5 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

***Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp.0***

E.6 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Ekuitas Akhir
Rp.(5.458.800)

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.(5.458.800) dan Rp.(4.340.000)

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.1.1. PENGAJUAN PENGANTIAN UANG PERSEDIAAN (SPM GUP)

Penggantian Uang Persediaan diajukan dengan SPM Nomor: 00008T/663293/2025 Tanggal 4 Juli 2025 dan telah terbit SP2D Nomor: 259991310182751 Tanggal 4 Juli 2025. Adapun rincian belanja sebagai berikut:

AKUN	URAIAN	NILAI
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.250.000
521211	Belanja Bahan	2.100.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000
	JUMLAH	7.250.000

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1. NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang telah dicapai sampai dengan periode 30 Juni 2025 sebesar 92.12. Adapun rincian perhitungan nilai IKPA sebagai berikut:

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Nilai	100.00	68.67	97.25	0.00	0.00	99.17	96.11	73.69	80%	0.00	92.12
Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
Nilai Akhir	10.00	10.30	19.45	0.00	0.00	9.92	24.03				
Nilai Aspek	84.34		98.21				96.11				

F.2.2. CAPAIAN OUTPUT

Adapun rincian capaian output sampai dengan periode 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Program	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)						GAP ²	Kode Ket	PN	Keterangan	Terkonfirmasi	Validasi	Catatan	Tanggal Rekam Di Sakti	Tanggal Kirim Di Sakti	Action		
				Pagu	Realisasi ¹	%	Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini												
									RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO										TPCRO (%)	PCRO (%)	
BF	1058	BCAU03	Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	93,145,000	27,361,500	29.38	65	Perkara	5.00	8.00	10.00	27.0000	50.00	50.00	20.62	04	Non PN	Sudah dihitung dan dilaksanakan sesuai perkara yang masuk		00 - Data Valid	03-JUL-25	03-JUL-25	Lihat catatan	-
BF	1058	BCAU05	Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	936,000	0	0.00	8	Perkara	0.00	8.00	10.00	0.0000	48.00	40.00	40.00	04	Non PN	Sudah dilaksanakan sesuai perkara yang ada		00 - Data Valid	03-JUL-25	03-JUL-25	Lihat catatan	-
BF	1058	QCA001	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Pengadilan Militer	52,600,000	26,100,000	49.62	8	Perkara	0.00	0.00	10.00	6.0000	50.00	60.00	10.38	04	PN	Direncanakan pelaksanaan kegiatan bulan Agustus 2025		00 - Data Valid	03-JUL-25	03-JUL-25	Lihat catatan	-



2025



DATA DUKUNG LAPORAN KEUANGAN

- UNTUK PERIODE YANG
BERAKHIR 30 JUNI 2025

**PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA 05**

Jl. Perempatan Ringroad Timur Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta
Telp. (0274) 452220 Fax. (0274) 452254 | Email : dilmil211yogyakarta@gmail.com
Website : www.dilmil-yogyakarta.go.id

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (663293) PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA

Tgl Data : 16/07/25 7:06 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 9:03 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	7,800,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,791,200	0
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	7,250,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	7,800,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	53,461,500
0.0	391111	Ekuitas	0	370,000
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	341,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	8,520,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	100,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	26,000,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,950,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	22,378,800	0
JUMLAH			68,881,500	68,881,500

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 16 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Paija S.H.

Mayor Chk NRP 2920087110870

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (663293) PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA

Tgl Data : 16/07/25 6:26 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 9:03 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	53,461,500
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	341,500	0
3.0	521211	Belanja Bahan	6,420,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	19,550,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	100,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,000,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,050,000	0
JUMLAH			53,461,500	53,461,500

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 16 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Paija, S.H.

2920087110870

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 05
SATUAN KERJA : PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA 663293

Tgl Data : 16/07/25 7:06 AM
Tgl Cetak : 16/07/25 9:02 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	146,681,000	53,461,500	(93,219,500)	36.45	93,972,000	44,962,000	(49,010,000)	47.85
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	146,681,000	53,461,500	(93,219,500)	36.45	93,972,000	44,962,000	(49,010,000)	47.85
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 05
SATUAN KERJA : PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA 663293

Tgl Data : 16/07/25 7:06 AM
Tgl Cetak : 16/07/25 9:02 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	146,681,000	53,461,500	(93,219,500)	36.45	93,972,000	44,962,000	(49,010,000)	47.85
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 16 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran
(Signature)
Raija, S.H.
Mayor Chk NRP 2920087110870

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 663293
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
DI YOGYAKARTA
PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 16/07/25 9:03 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 16/7/25 8:21 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	25,801,000	17,676,000	341,500	0	341,500	1.93	17,334,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	25,801,000	17,676,000	341,500	0	341,500	1.93	17,334,500
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	29,412,000	29,412,000	6,420,000	0	6,420,000	21.83	22,992,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	29,412,000	29,412,000	6,420,000	0	6,420,000	21.83	22,992,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	14,608,000	27,933,000	19,550,000	0	19,550,000	69.99	8,383,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	14,608,000	27,933,000	19,550,000	0	19,550,000	69.99	8,383,000
5221	Belanja Jasa							
522191	Belanja Jasa Lainnya	13,960,000	8,760,000	100,000	0	100,000	1.14	8,660,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	13,960,000	8,760,000	100,000	0	100,000	1.14	8,660,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52,400,000	52,400,000	26,000,000	0	26,000,000	49.62	26,400,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,500,000	10,500,000	1,050,000	0	1,050,000	10	9,450,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	62,900,000	62,900,000	27,050,000	0	27,050,000	43	35,850,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	146,681,000	146,681,000	53,461,500	0	53,461,500	36.45	93,219,500
	JUMLAH BELANJA	146,681,000	146,681,000	53,461,500	0	53,461,500	36.45	93,219,500

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (663293) PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA

Tgl Data : 16/07/25 7:06 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 9:02 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	7,800,000	0	7,800,000	0.00
Persediaan	1,791,200	370,000	1,421,200	384.11
JUMLAH ASET LANCAR	9,591,200	370,000	9,221,200	2,492.22
JUMLAH ASET	9,591,200	370,000	9,221,200	2,492.22
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Yang Belum Ditagihkan	7,250,000	0	7,250,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	7,800,000	0	7,800,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15,050,000	0	15,050,000	
JUMLAH KEWAJIBAN	15,050,000	0	15,050,000	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	(5,458,800)	370,000	(5,828,800)	(1,575.35)
JUMLAH EKUITAS	(5,458,800)	370,000	(5,828,800)	(1,575.35)
JUMLAH EKUITAS	(5,458,800)	370,000	(5,828,800)	(1,575.35)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	9,591,200	370,000	9,221,200	2,492.22

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 16 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Pajja, S.H.

Mayor Chk NRP 2920087110870

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
 WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : (663293) PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA

Tgl Data : 16/07/25 7:06 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 9:01 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	22,378,800	19,831,100	2,547,700	12.847
Beban Barang dan Jasa	8,961,500	7,909,000	1,052,500	13.308
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	27,950,000	25,769,000	2,181,000	8.464
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
 WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : (663293) PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA

Tgl Data : 16/07/25 7:06 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 9:01 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	59,290,300	53,509,100	5,781,200	10.804
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(59,290,300)	(53,509,100)	(5,781,200)	10.804
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(59,290,300)	(53,509,100)	(5,781,200)	10.804
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(59,290,300)	(53,509,100)	(5,781,200)	10.804

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 16 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Pajja, S.H.

Mayor Chk NRP 2920087110870



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (663293) PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA

Tgl Data : 16/07/25 6:26 AM

Tgl Cetak : 16/07/25 9:02 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	370,000	4,207,100	(3,837,100)	(91.21)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(59,290,300)	(53,509,100)	(5,781,200)	10.8
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	53,461,500	44,962,000	8,499,500	18.9
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(5,828,800)	(8,547,100)	2,718,300	(31.8)
EKUITAS AKHIR	(5,458,800)	(4,340,000)	(1,118,800)	25.78

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 16 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Paija, S.H.
Mayor Chk NRP 2920087110870

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER I TAHUN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (663292) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
 Kode dan Nama UAPPAW : (0400) Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
 Kode dan Nama Eselon 1 : (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
 Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung RI

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	V	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	V	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	V	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	V	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	V	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	V	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	V	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	V	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	V	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V	Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		V
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	V	
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		V
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>			
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V

2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNPB		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak

13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		V	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	N/A	N/A	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A	N/A	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	N/A	N/A	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	N/A	N/A	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	N/A	N/A	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	0		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		V	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?		V	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		V	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			

	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	V		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		V	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas				
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	V		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	V		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	V		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		V	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		V	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	V		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	V		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		V	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	N/A	N/A	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	N/A	N/A	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	N/A	N/A	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?	N/A	N/A	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	N/A	N/A	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	N/A	N/A	Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?	N/A	N/A	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	N/A	N/A	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	N/A	N/A	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	N/A	N/A	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	N/A	N/A	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

Mengetahui
Rejabat Penyusun LKKL,

Paija, S.H.
Mayor Cnk NRP 2920087110870

Yogyakarta, 16 Juli 2025
Penelaah,

Adrian Ferry Lizardi, S.E.
NIP 199407282020121001



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 663293
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	146,681,000	146,681,000	0
2	Belanja	53,461,500	53,461,500	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	7,800,000	7,800,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	7,800,000	7,800,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15-JUL-25



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juni 2025

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-005.05.2.663293/2025

Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Tahun : 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.51) DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA KPPN : (030) Yogyakarta

Satuan Kerja : (663293) PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 550.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00009/SSP/663293/2025

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	1.088.500,00	13.901.603,00	14.440.103,00	550.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	1.088.500,00	13.901.603,00	14.440.103,00	550.000,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	1.088.500,00	7.190.103,00	7.728.603,00	550.000,00
	1. BP UP*)	1.088.500,00	6.711.500,00	7.250.000,00	550.000,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	478.603,00	478.603,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 7.250.000,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

- II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	550.000,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	550.000,00	

- III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	550.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	550.000,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	550.000,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	7.250.000,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	7.800.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	7.800.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Paija, S.H.
Mayor Chk NRP 2920087110870

KOTA YOGYAKARTA, Juni 2025

Bendahara Pengeluaran



NGATINI, S.H.

NIP 197606272006042002

Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Senin tanggal 30 bulan Juni tahun 2025, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 651556632931000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 550.000,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00009/SSP/663293/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	550.000,00
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3 Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	550.000,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	550.000,00
2 Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0,00
4 Saldo Pajak	Rp.	0,00
5 Saldo Hibah	Rp.	0,00
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	550.000,00

C. Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0,00
------------------------------	-----	------

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	550.000,00
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	550.000,00

B. Selisih Kas (I.A.-II.A.3)	Rp.	0,00
------------------------------	-----	------

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	550.000,00
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	7.250.000,00
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	7.800.000,00
2 a. Saldo TUP	Rp.	0,00
b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0,00
3 Saldo Lainnya	Rp.	0,00
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	7.800.000,00

B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	7.800.000,00
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0,00
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0,00
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	7.800.000,00

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0,00
--	-----	------

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

0,00-

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0,00-

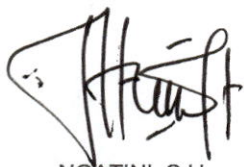
C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)

0,00-

D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)

0,00-

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



NGATINI, S.H.

NIP 197606272006042002

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Paija, S.H.

Mayor Chk NRP 2920087110870

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 663293

BULAN : JUNI 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	651556632931000	BPG 030 DILMIL II-11 YOGYAKARTA 05	null	20	S-1829/WPB.12/KP.06/2020	08-07-2020	2025-06-11	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



NGATINI, S.H.

NIP 197606272006042002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN**BULAN : JUNI 2025**

Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Propinsi / Kabupaten / Kota : (04.51) DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA
Satuan Kerja : (663293) PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA66329300-
No Rekening : 651556632931000
Nama Rekening : BPG 030 DILMIL II-11 YOGYAKARTA 05
Nama Bank : null
Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Mei 2025			0,00
05-06-2025	FPK-PENG- kHXOVaBohiuFo4	GUP	6.711.500,00	0,00	6.711.500,00
11-06-2025	FPK-PENG- vA9VrCQyYUOrztg	[DARI TUNAI] GUP	0,00	6.711.500,00	0,00
Jumlah			6.711.500,00	6.711.500,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (05)
PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA (663293)
Rekening Induk : RKK DITJEN BADILMILT (032901xxxxxx307)
Virtual Account : 651556632931000 | BPG 030 DILMIL II11 YOGYAKARTA 05
Periode : 01-06-2025 s/d 30-06-2025

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-06-05	10:02:06	40223937	From 032901003295305 to 651556632931000 SETORAN_65155_6632931000 250301301006867000001 dari 032901003295305	0,00	0,00	6.711.500,00	6.711.500,00	SPAN	
2025-06-11	11:15:52	40335118	penarikan oleh bp mardopo	6.711.500,00	6.711.500,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		6.711.500,00	6.711.500,00			
			Saldo Akhir				0,00		



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Yogyakarta - 030

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA (663293)

Cetak Tanggal 02-07-2025

Periode : 2025-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	030	466065	26-Jun-25	PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA DIREKTOR 0001091180543000	0A8495BM72FJSFRN 002211755744	411618	IDR	478,603	ADA
TOTAL								478,603	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 197606272006042002 pada 02-07-
2025 14:03:08 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA
Transaksi PNBP PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA (663293)

Cetak Tanggal 02-07-2025

Periode : 2025-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 197606272006042002 pada 02-07-
2025 14:03:08 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA (663293)

Cetak Tanggal 02-07-2025

Periode : 2025-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 197606272006042002 pada 02-07-2025 14:03:08 WIB.

LEMBAR BUKTI VALIDASI LPJ BENDAHARA

Jenis LPJ : LPJ Bendahara Pengeluaran

Periode LPJ : 2025-06

Sequence LPJ : 00003/LPJ/66329300/06/2025

Kode Satker : 663293

Nama Satker : PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA

Tanggal Kirim : 02/07/2025 14:41

Telah dilakukan validasi melalui SAKTI oleh Seksi Verifikasi Akuntansi/Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Yogyakarta (030) dengan timestamp 03/07/2025 08:39 WIB.

Petugas Validator LPJ :

Staf : SURWIDIYATI pada 03/07/2025 08:36.

Kasi : ENDANG ZAINATUN pada 03/07/2025 08:39.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA
PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
Jl. Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta
Nomor Telepon Staff : (0274) 452220 Fax : (0274) 452254
Email : dilmil211yogyakarta@gmail.com Website : www.dilmil-yogyakarta.go.id

BERITA ACARA OPNAME FISIK PERSEDIAAN TAHUN 2022
PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
KODE SATKER 005.05.0400.663293.000.KD
Nomor: W2.Mil 04/ 08/BA-BMN/VI/2025

Pada hari ini Senin Tanggal Tigapuluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Duapuluh Lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Joko Yuswanto.
Pangkat/NRP : Serka / 31960119480674
Jabatan : Ketua
2. Nama : Mohamad Hasyim Ichsanudin, S.H., MBA
NIP : 1982041820110111009
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Dwi Laksono.
Pangkat/NRP : Kopka / 31980152021176
Jabatan : Anggota

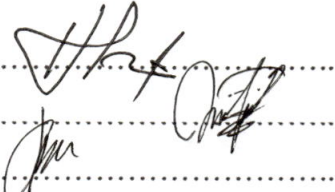
Menyatakan bahwa telah melakukan Stock Opname barang persediaan sebagaimana terlampir dalam lampiran Berita Acara Opname Fisik (*Stock Opname*). Adapun total Nilai Barang per 30 Juni 2025 Meliputi :

a. Barang Konsumsi	: 1.791.200,-
b. Amunisi	: 0,-
c. Bahan Untuk pemeliharaan	: 0,-
d. Suku Cadang	: 0,-
e. Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	: 0,-
f. Pita ukai dan Legas	: 0,-
g. Bahan Baku	: 0,-
h. Barang Dalam Proses / Setengah Jadi	: 0,-
i. Tanah / Bangunan Untuk Dijual	: 0,-
j. Hewan dan tanaman untuk dijual	: 0,-
k. Total	: 1.791.200,-

Demikian Berita Acara Persediaan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Stock Opname :

1. Joko Yuswanto. Ketua
2. Mohamad Hasyim Ichsanudin, S.H., MBA Sekretaris
3. Dwi Laksono. Anggota





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA
PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
Jl. Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta
Nomor Telepon Staff : (0274) 452220 Fax : (0274) 452254

HASIL OPNAME FISIK SEMESTER I TAHUN 2025

Nama Satker : Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
Kode Satker : 005.01.0400.663293.000 KD
UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
UAPPB-E1 : Mahkamah Agung

No.	Nama Barang	Kode Barang	Kuantitas Barang		Selisih	Kondisi		
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang	Rusak
1	Bolpoint Boliner	1010301001000009	6	6	0	√	-	-
2	Map Jepit Plastik	1010301006000002	10	10	0	√	-	-
3	Isi Staples	1010301013000001	2	2	0	√	-	-
4	Kertas HVS 70gr Folio	1010302001000002	10	10	0	√	-	-
5	Kertas HVS 70gr Kwarto	1010302001000004	3	3	0	√	-	-
6	Refill Toner	1010304004000007	6	6	0	√	-	-

Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta





INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	030	005	663293	PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	68.67	97.25	0.00	0.00	99.17	96.11	73.69	80%	0.00	92.12
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.30	19.45	0.00	0.00	9.92	24.03				
					Nilai Aspek	84.34		98.21				96.11				



DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO

periode : JUNI satker : 663293

No	Satker	Nama Satker	BAES1	Periode	Program	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)						GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan	Terkonfirmasi	Validasi	Catatan	Tanggal Rekam Di Sakti	Tanggal Kirim Di Sakti	Action			
									Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini										Catatan	Validasi		
														RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO												TPCRO (%)	PCRO (%)
1	663293	PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA	00505	6	BF	1058	BCAU03	Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	93,145,000	27,361,500	29.38	65	Perkara	5.00	8.00	10.00	27.0000	50.00	50.00	20.62	04	Non PN	Sudah dihitung dan dilaksanakan sesuai perkara yang masuk		00 - Data Valid		03-JUL-25	03-JUL-25	Lihat catatan	-
2	663293	PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA	00505	6	BF	1058	BCAU05	Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	936,000	0	0.00	8	Perkara	0.00	8.00	10.00	0.0000	48.00	40.00	40.00	04	Non PN	Sudah dilaksanakan sesuai perkara yang ada		00 - Data Valid		03-JUL-25	03-JUL-25	Lihat catatan	-
3	663293	PENGADILAN MILITER II - 11 DI YOGYAKARTA	00505	6	BF	1058	QCA001	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	52,600,000	26,100,000	49.62	8	Perkara	0.00	0.00	10.00	6.0000	50.00	60.00	10.38	04	PN	Direncanakan pelaksanaan kegiatan bulan Agustus 2025		00 - Data Valid		03-JUL-25	03-JUL-25	Lihat catatan	-